

SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI
PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:

CUT DINUL QAIMAH
NIM. 160604015

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M /1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Dinul Qaimah
NIM : 160604015
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Yang Menyatakan,


(Cut Dinul Qaimah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Cut Dinul Qaimah
NIM. 160604015

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 197204281999031005

A R - R A N I R Y



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cut Dinul Qaimah
NIM : 160604015
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 160604015@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Penulis

Cut Dinul Qaimah
NIM. 160604015

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Juanda, SE., MM
NIP. 198212312005011005

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasuluulah terakhir yang diutus dengan membawa peradaban dari alam jahiliyah (*kebodohan*) ke alam yang penul dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta Bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Baisnis Islam. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat disusun sesuai dengan harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai tentunga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupaun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si. Selaku ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) dan penulis serta Marwiyati, SE., MM Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Juanda, S.E., MM selaku Pembimbing I dan Jalilah S.HI., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberiakan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Suriani, SE., M.Si selaku Penguji I dan Sri Sukma Wahyuni, SE., M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua dan saudara-saudara saya yang tercinta, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas ke ikhlasan kedua orang tua, Ayahanda T.Isa dan Ibunda

Cut Faridah atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan, kepercayaan, dukungan moral, material dan selalu memeberikan doanya, serta nasehat selama ini, untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Ekonomi khususnya angkatan 2016 yang mendukung baik diperkuliahan maupun di luar perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh 12 Juli 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Cut Dinul Qaimah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Cut Dinul Qaimah
NIM : 160604015
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Juanda, SE.,MM
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

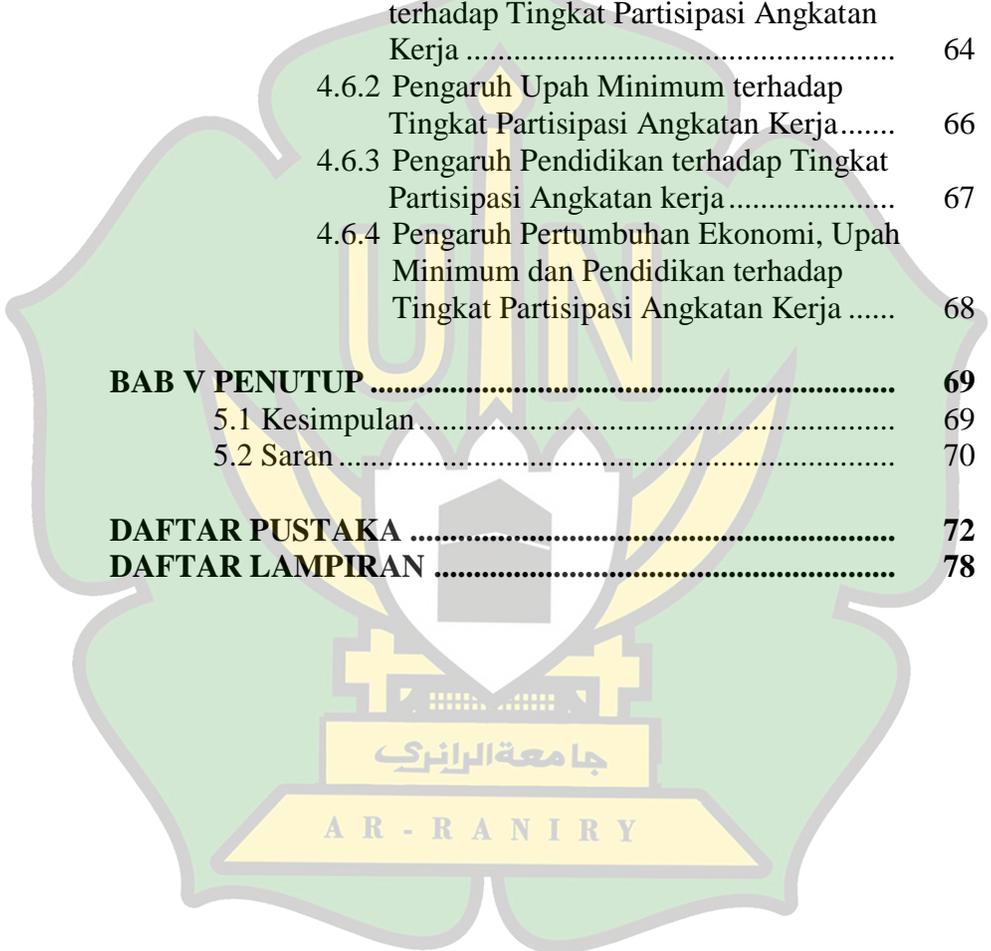
Tingkat Partisipasi angkatan kerja atau yang biasa disingkat TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat TPAK kita dapat mengetahui sejauh mana para angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh tahun 2012-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Tenaga kerja	15
2.1.1 Pengertian Tenaga kerja.....	15
2.1.2 Teori Permintaan dan Penawaran kerja	17
2.1.3 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	19
2.1.4 Faktor-Faktor Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	21
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.3 Upah Minimum.....	27
2.3.1 Pengertian Upah Minimum	27
2.3.2 Teori Upah.....	28
2.4 Pendidikan	30
2.4.1 Pengertian Pengertian Pendidikan.....	30

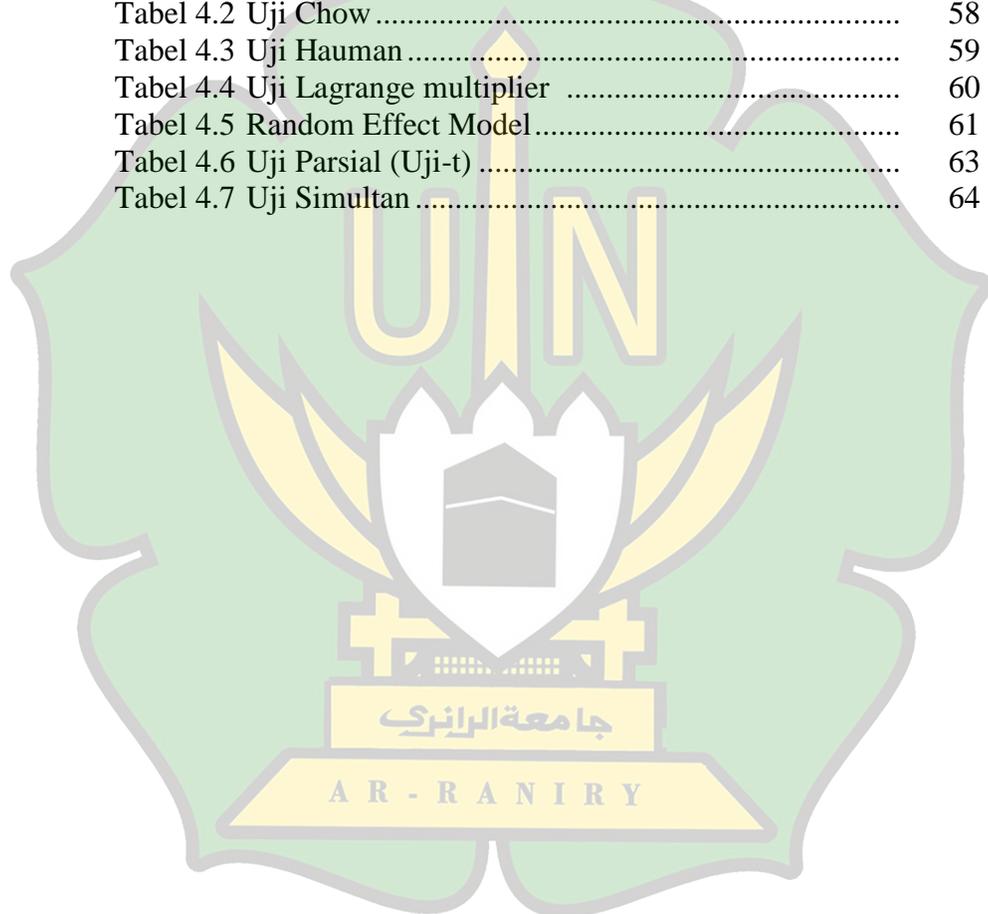
2.4.2 Teori dan Konsep Pendidikan.....	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Hubungan Antar Variabel.....	35
2.6.1 Hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	35
2.6.2 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	37
2.6.3 Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	38
2.7 Kerangka Pemikiran	38
2.8 Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	42
3.4 Definisi Operasional Variabel	43
3.5 Motode Analisis Data	44
3.5.1 Analisis Regresi Data Panel	44
3.5.2 Model Estimasi Data Panel	45
3.5.3 Uji Goodness Of Fit.....	47
3.6 Pengujian Statistik	49
3.6.1 Uji Parsial (Uji T)	49
3.6.2 Uji Silmultan (Uji F).....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umun Provinsi Aceh.....	51
4.1.1 Kondisi Geografis.....	51
4.2 Analisis Deskriptif.....	52
4.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	52
4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	54
4.2.3 Upah Minimum	55
4.2.4 Pendidikan	56
4.3 Estimasi Regresi Data Panel.....	58
4.3.1 Uji Chow	58
4.3.2 Uji Hausman.....	59
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier	60

4.4 Hasil Uji Goodness of Fit	61
4.5 Uji Hipotesis	62
4.5.1 Uji t	62
4.5.2 Uji F	64
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64
4.6.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	66
4.6.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	67
4.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan Di Provinsi Aceh Tahun 2020.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.2 Uji Chow	58
Tabel 4.3 Uji Hauman	59
Tabel 4.4 Uji Lagrange multiplier	60
Tabel 4.5 Random Effect Model.....	61
Tabel 4.6 Uji Parsial (Uji-t)	63
Tabel 4.7 Uji Simultan	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi tahun 2020.....	3
Gambar 1.2 PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2020.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2020.....	53
Gambar 4.2 PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2020.....	54
Gambar 4.3 Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2012-2020.....	56
Gambar 4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Dan Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Tahun 2012-2020.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Analisis Regresi Panel	78
Lampiran 2	Data logaritma Analisis regresi Panel	83
Lampiran 3	Hasil Common Effect Model	88
Lampiran 4	Hasil Fixed Effect Model	89
Lampiran 5	Hasil Random Effect Model.....	90
Lampiran 6	Hasil Uji Chow.....	91
Lampiran 7	Hasil Uji Hauman.....	92
Lampiran 8	Hasil Uji Lagrange Multiplier	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia tercatat ada sekitar 270,2 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 136,66 juta jiwa laki-laki dan 133,54 juta jiwa perempuan. Ketika laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja dan akan menyebabkan persediaan tenaga kerja juga harus banyak. Jika kesempatan kerja yang tersedia tidak mencukupi sedangkan jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah hal ini hanya akan menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak yang pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan bagi negara.

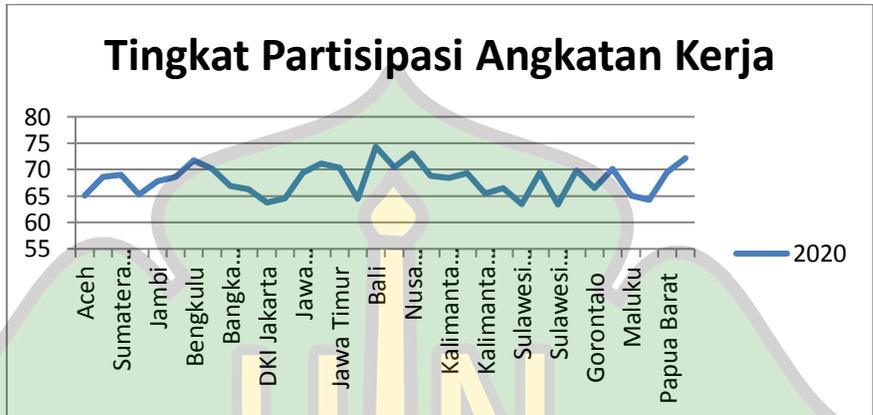
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam waktu jangka panjang. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang lajunya semakin cepat. Untuk negara yang berkembang seperti Indonesia yang di mana pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di negara

berkembang cenderung lebih cepat sehingga melebihi pertumbuhan perkapita (Rukmana, 2019).

Pembangunan ekonomi juga merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini juga sebagai acuan suatu daerah untuk dapat dikatakan baik dari segi perekonomiannya, infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia dan peran pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang dampaknya dapat memperluas dan meningkatkan standar hidup, lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan dan faktor pengikut lainnya seperti ekonomi dan sosial (Sulistiyono, 2019).

Salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah tertentu. Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri merupakan penduduk usia kerja yang ikut serta pada pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 1.1
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Menurut Provinsi di
Indonesia Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi yang ada di Indonesia tahun 2020 tertinggi ditempati oleh provinsi Bali sebesar 74,32 persen, kemudian diikuti oleh provinsi NTT sebesar 73,11 persen. Provinsi Aceh memiliki angka tingkat partisipasi angkatan kerja yang tergolong rendah yaitu sebesar 65,10 persen, perikat ke-8 seIndonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja rendah itu menunjukkan bahwa kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja, sehingga akan meyebabkan tingginya angka pengangguran.

Berikut merupakan data kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh disajikan dalam bentuk tabel 1.1

Tabel 1. 1
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Angkatan Kerja	2.526.505
Bekerja	2.359.905
Pengangguran	166.600
Bukan Angkatan Kerja	1.354.597
Sekolah	364.266
Mengurus Rumah Tangga	763.324
Lainnya	227.007
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,59

Sumber: BPS Provinsi Aceh

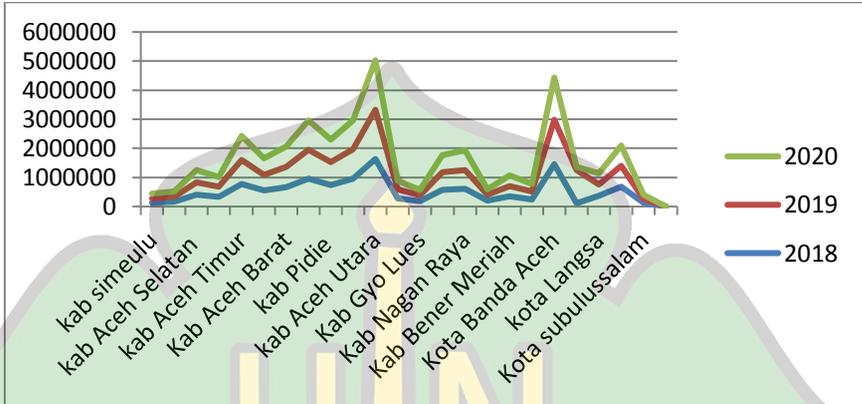
Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa jumlah Angkatan kerja Provinsi Aceh tahun 2020 adalah 2.526.505 jiwa, jumlah penduduk yang bekerja adalah 2.359.905 jiwa. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah sebanyak 1.354.597 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,10%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 166.600 jiwa.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks, dan pengangguran adalah masalah dari tidak seimbangnya antara (*demand of labor*) dan (*supply of labor*). Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat

memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran (Indradewa dan Natha, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Jika pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan maka akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak pada tingkat upah yang layak sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat (Rusalia 2018). Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan Provinsi Aceh didorong oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota di Aceh. Berikut ini merupakan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh:

Gambar 1.2
PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Kabupaten/kota
di Provinsi Aceh tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Data Diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap tahun wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seluruhnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan nilai tambah yang disajikan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah atau seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tingkat upah yang layak. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya khususnya di Provinsi Aceh belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini dikarenakan belum maksimalnya seluruh sektor ekonomi dalam

mengelola dan memberikan dampak kesempatan kerja kepada masyarakat (Sulistiono, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisiensi regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan. Artinya jika pertumbuhan ekonomi baik maka kegiatan produksi yang meningkat sehingga membutuhkan input produksi yang berupa tenaga kerja yang juga naik.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja salah satunya adalah upah, karena upah merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas menjadi lebih optimal merupakan sistem pengupahan dalam perusahaan. Upah yang diterima oleh para tenaga kerja tergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Data yang mengenai kenaikan upah diberbagai negara, terutama negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa para pekerja berkaitan erat antara kenaikan upah dengan kenaikan produktivitas. Faktor tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidaknya dalam pasar tenaga kerja. Dimana jika tingkat upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk kedalam pasar tenaga kerja, hal tersebut otomatis akan mengakibatkan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Sulistiyono, 2019).

Selain pertumbuhan ekonomi dan upah minimum yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah sejauh mana pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan yang umumnya dibagi dalam beberapa tahap seperti Prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan universitas. Salah satu indikator untuk melihat kualitas angkatan kerja yaitu dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Karena pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Dengan perkembangan pengetahuan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan lamanya menempuh pendidikan, maka akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Dengan demikian, pendidikan merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi Aceh tidak begitu berjalan dengan lancar karena di samping tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat juga dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah sehingga tidak semua dapat diserap didunia kerja. Selain itu, tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah tetapi banyak juga yang berpendidikan tinggi namun tidak diserap dalam dunia kerja karena tidak berkualitas atau tidak mempunyai skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja (Sulistiwati, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Makassar periode 2000-2009. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2017, fertilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2017 dan tingkat upah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di provinsi Sumatera Barat tahun 2000-2017.

Penelitian Sholihah (2018) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Pati. Sedangkan Upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Pati. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2010) menyatakan bahwa terdapat 4 variabel bebas yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di Kota Medan, yaitu tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan wanita, namun pendapatan lain berpengaruh negatif, sedangkan upah tidak signifikan berpengaruh partisipasi angkatan kerja di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/kota Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: **A R - R A N I R Y**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi rekan mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ketenagakerjaan terutama masalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Aceh. Dan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku perguruan tinggi.

b. Bagi Umum

Diharapkan dapat bahan informasi bagi pihak terkait dan menjadi tambahan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan yang terkait.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu rujukan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan terkait tingkat partisipasi angkatan kerja dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas angkatan kerja.

1.5 Sistematis Pembahasan

Sistematis pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tersusun dan terarah. Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pada BAB I : yaitu pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional serta sistematis penulisan skripsi

2. Pada BAB II : Kajian pustaka dan landasan teori dalam bagian ini akan diuraikan pengertian tingkat partisipasi angkatan kerja, pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian upah minimum dan pendidikan. Pada bagian ini juga akan memaparkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan pula kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis.
3. Pada BAB III : Metode penelitian bab ini dikemukakan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis yang digunakan dan uji statistic yang digunakan.
4. Pada BAB IV : Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya yang diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Uraian dalam bab ini terdiri dari penjelasan tentang objek penelitian yang diteliti, deskriptif data yaitu faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh. Selanjutnya hasil dari analisis data akan diinterpretasikan dan kemudian diikuti oleh penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dipaparkan akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
5. Pada BAB V : yaitu penutup, bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dipaparkan dalam bentuk uraian padat. Saran

disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti permasalahan yang sejenis. Penelitian ini juga berisi daftar pustaka dan lampiran yang meliputi lembar konsultasi, lembar sk, lampiran data-data penelitian, hasil output EVIEWS, serta daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Tenaga Kerja

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang kita maksud adalah “*human reources*” disini ialah penduduk sebagai suatu keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun (Sulistiyono,2019).

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang no 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun.

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Sumber daya manusia mencerninkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, pengertian yang pertama ini mengandung aspek kualitas. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut, pengertian kedua ini mengandung kuantitas. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang telah masuk usia kerja (Sulistiyono, 2019).

Di dalam pengertian tenaga kerja, dimana tenaga kerja dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Golongan angkatan kerja adalah kelompok yang ikut serta dalam pasar tenaga kerja yang dimana kelompok ini dibagi menjadi dua golongan yaitu bekerja dan menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan golongan bukan angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok bersekolah dan mengurus rumah tangga, meskipun kelompok ini tidak bekerja tetapi secara fisik dan mental mereka mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat masuk kedalam kelompok angkatan kerja (Hatta, 2017).

2.1.2 Teori Permintaan dan Penawaran Kerja

a. Teori Permintaan Tenaga kerja

Permintaan Tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan disuatu perusahaan atau instansi lainnya. Analisa permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah (yang dilihat dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan yang diperkerjakan.

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Basuki, 2014). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah:

1. Perubahan tingkat upah

Anuari (2018), Menyatakan perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut: .

- a) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang

diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau "*scale effect*"

- b) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka perusahaan ada yang lebih suka menggunakan teknologi untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja.

b. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kualitas. Dalam konsep tenaga kerja penawaran adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap menyediakannya. Secara khusus

suatu kurva melukiskan jumlah maksimum yang disiapkan pada setiap kemungkinan tingkat upah untuk periode waktu. Sebagai alternatif, kurva penawaran tenaga kerja dapat dipandang bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja sebagai tingkat upah minimum yang dengan tingkat itu para pemilik tenaga kerja siap menyediakan jumlah khusus itu.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah. Sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Contoh apabila upah sebagai kepala marketing naik relatif tinggi dari upah jenis jabatan dibagikan administrasi (karena kebutuhan yang meningkat), maka dapat diduga bahwa tendensi untuk menjadi kepala marketing akan meningkat pula. Akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang tinggi tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah dan sebaliknya (Anuari, 2018).

2.1.3 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi populasi manusia kerja suatu negara atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai presentase

dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja biasanya 15 tahun keatas (Resmiati. 2018).

Konsep tingkat partisipasi angkatan kerja menurut BPS adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*Labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dapat dihitung menggunakan persamaan seperti berikut (Hatta, 2017):

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100 \%$$

Dari rumus diatas, maka dapat di simpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dihitung baik bagi seluruh angkatan kerja atau untuk bagian-bagiannya. Seperti untuk golongan kelamin dan golongan umur tertentu. Jumlah penduduk usia kerja dalam satu kurun waktu dapat tetap, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu sama-sama bisa berubah-ubah.

2.1.4 Faktor-Faktor Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut penelitian Hidayat (2014) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang masih sekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkat penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga

- b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota keluarga bekerja yang mengurus rumah tangga semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja.

- c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga yang berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja. Jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya jika keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja. Jadi TPAK relatif meningkat.

- d. Stuktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok 25-55 tahun, terutam laki-laki umumnya dituntut untuk mencari kerja. Oleh karena itu TPAK relatif besar. Selanjudnya

penduduk diatas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat. Semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk kepasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan Perekonomian

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin bertambahnya semakin besar TPAK.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi didefinisikan

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu proses perekonomian secara terus-menerus atau keseimbangan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Sukirno, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di daerah tertentu yaitu kenaikan nilai tambah. Pendapatan suatu wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di suatu daerah (tanah, modal, tenaga kerja, serta teknologi) yang berarti menggambarkan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, dimana presentase pertumbuhan output harus lebih tinggi dari presentase penambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan akan berlanjut.

Sebagai tolak ukur banyak dipakai untuk mengukur perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adalah hasil produk barang dan jasa orang-orang dan perusahaan. Dinamakan Bruto karena memasuki komponen penyusutan. Dinamakan Domestik karena batasannya adalah suatu wilayah atau negara, sehingga didalamnya termasuk hasil-hasil barang dan jasa perusahaan serta yang di hitung adalah produksi

barang dan jasa. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang merupakan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Riil pada suatu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Zahari, 2017).

Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan ekonomi itu sebagai kenaikan output tanpa melihat apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri ditandai dengan adanya laju kenaikan produk perkapita yang tinggi, sehingga untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah.

Definisi yang bersifat umum mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya kenaikan *Gross Domestik Product* (GDP) riil perkapita pada periode tertentu (Ferdinandus, 2014).

Menurut (Sulistiyono, 2019) Pertumbuhan ekonomi juga sangat penting dan dibutuhkan sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Disimpulkan bahwa proses produksi selalu membutuhkan sumber daya manusia sebagai faktor penggerak suatu perekonomian di suatu daerah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Australia. Model Solow-Swan ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dan peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat.

Model pertumbuhan selow merupakan pengembangan dari Formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan variabel tenaga kerja serta memperkenalkan teknologi. Model pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam stok modal, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi tingkat output (Tarigan, 2014).

b. Teori Harrod-Domar Dalam sistem Regional

Teori ini melengkapai teori keynes, dimana keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi: perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung ($MPS = s$) adalah sebagian kecil dari peningkatan pendapatan yang tidak dihabiskan dan digunakan untuk menabung, proses produksi memiliki koefisien yang tetap, serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan yang bagus tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak. Pada ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keduanya sangat sulit. Dalam hal ini, apabila adanya suatu peningkatan kegiatan produksi yang jumlahnya berlebihan dan outputnya tidak dapat diserap maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian yang dimana dampaknya akan adanya pengurangan tenaga kerja. Dengan demikian, jika ada peningkatan produksi di suatu sektor lainnya akan mengikuti dan tumbuh secara seimbang (Tarigan, 2014).

2.3 Upah Minimum

2.3.1 Pengertian Upah Minimum

Upah adalah sebagian imbalan dari atasan kepada karyawannya untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan atas dasar persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayar atas dasar suatu perjanjian antara atasan dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri atau keluarganya (Sulistiyono, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no. 78 tahun 2015, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kehidupan dan kebutuhan tenaga kerja dengan memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum di hitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Sumber : Undang-Undang Pengupahan no. 78 tahun 2015

Keterangan :

UM_n = Upah minimum yang ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode september tahun lalu september tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan tahun berjalan.

2.3.2 Teori Upah

a. Teori Malthus

Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*). Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja dengan sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini akan menekan tingkat upah,

sebaliknya secara simetris tingkat upah akan naik apabila penduduk berkurang. Sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Dengan asumsi lain usaha untuk menaikkan tingkat upah dalam jangka panjang, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Jadi dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan tingkat jumlah penduduk (Afrida, 2007).

Jumlah penduduk terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwaselalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya di menangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Sulistiawati, 2012).

b. Teori David Ricardo

Dalam teori David Ricardo mengatakan ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dibayarkan kepadapekerja juga meningkat. Jika penyerapan tenaga kerja ini dikaitkan dengan upah minimum regional (UMR), maka dapat

diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan negatif upah dengan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah upah akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran industri yang akan menurunkan besaran laba optimum industri tersebut. Tentunya akan menghambat industri untuk berkembang, untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak jarang suatu industri harus menenpuh dengan cara pengurangan tenaga kerja atau Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghemat pengeluaran dan demi tercapainya laba optimum sektor industri tertentu (Purnami, 2014).

2.4 Pendidikan

2.4.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya masyarakat dan kebudayaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut

dinamakan dengan *Human Capital* (teori modal manusia). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai stock, dimana stock manusia setelah mengikuti pendidikan dengan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat membentuk atau meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivits kerja, dan peningkatan nilai rasional individu dibandingkan dengan sebelumnya mengecap pendidikan (Sari, 2013).

Tingkat pendidikan atau yang sering disebut dengan pendidikan dengan jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara mengajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan tersebut diselenggarakan pula pendidikan pra sekolah sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar (Sulistiyono, 2019).

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan ketrampilan. Melalui pendidikan yang baik kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat lebih ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan darai pendidikan itu sendiri, yaitu merubah sikap pengetahuan dan perilaku peserta

pendidikan yang sesuai yang diharapkan. Disimpulkan bahwa pendidikan itu akan memberi arahan bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan tujuan mendapat posisi sesuai dengan yang diinginkan.

2.4.2 Teori dan Konsep Pendidikan

Teori Humal capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat pengasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap penambahan satu tahun berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Menurut Sumarsono, kualitas tenaga kerja yang baik dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan merupakan proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian seseorang, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian. Untuk dapat bekerja seseorang dituntut memiliki pendidikan sebagai modal dasar, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula kemampuannya untuk bekerja (Sulistiyono, 2019).

Menurut Tirtarahardja dan Sulo menjelaskan bahwa pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan ketrampilan kerja pada calon iuran. tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan akan dicapai dan kemauan yang berkembang. Tingkat pendidikan berpengaruh

terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Hal ini membuktikan bahwa jika seseorang mengenyam pendidikan maka diharapkan dapat menambah, mengembangkan sekaligus dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan nasional atau daerahnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia. Menurut konsep investasi bidang pendidikan, ini akan menjadi stock dan modal dalam proses pengembangan dan peningkatan kesejahteraan melalui jalur pendidikan (Listianingsih, 2017).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu, Penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan topik, namun dalam pengolaan data atau analisis data dari jurnal- jurnal yang sudah ada berbeda baik tempat atau wilayah penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian dan Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syahputra (2020) Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, PDRB dan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif	Meneliti tentang tingkat partisipasi angkatan kerja	Variabel yang digunakan berbeda dan lokasi serta tahunnya

Tabel 2.1-Lanjutan

	Jumlah Penduduk terhadap TPAK di Sumatera Utara	Variabelnya adalah Upah, Pendidikan, PDRB dan Jumlah Penduduk		
2	Sanura (2019) Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Variabel yang digunakan adalah upah minimum dan pertumbuhan ekonomi	-Meneliti pengaruh variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi - Menggunakan data sekunder	variabel, tempat dan serta tahun penelitiannya berbeda
3	Rukmana (2019) Analisis Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) di Beberapa Provinsi di Indonesia.	Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel yang digunakan UMP, Umur, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi	-Memiliki 3 kesamaan variabel yaitu ump pendidikan dan pertumbuhan ekonomi - Menggunakan data sekunder	-Ada variabel lain dalam penelitian Rukmana (2019) yaitu umur
4	Lestari (2019) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Propinsi Sumatera Barat tahun 2000-2017.	Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda Variabel yang digunakan kemiskinan, fertilitas, tingkat upah, angkatan kerja	-Meneliti tentang TPAK - Memiliki satu kesamaan variabel yaitu upah	Variabelnya berbeda yaitu kemiskinan, fertilitas dan angkatan kerja
5	Bonerri (2018) Pengaruh pendidikan dan Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado.	Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dengan variabel UMR, dan lama pendidikan	-Meneliti tentang TPAK -Menggunakan data sekunder	variabel dan lokasi penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan

6	Ardella (2018) Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Pulau Jawa Tahun 2006- 2017.	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. variabelnya Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pendidikan dan upah minimum provinsi	-Meneliti tentang TPAK - Menggunakan metode kuantitatif	lokasi serta tahunnya berbeda dengan penelitian ini
7	Tiasajaya (2018) Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Tengah.	Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. variabel yang digunakan adalah PDRB, Kesempatan Kerja dan Pendidikan	Meneliti tentang TPAK - Menggunakan metode kuantitatif	Adanya variabel lain yaitu kesempatan kerja
8	Hidayat (2014) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2004-2012.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Variabelnya adalah upah minimum, penduduk usia prima dan penduduk usia kerja	-Meneliti tentang TPAK - Menggunakan data sekunder	Adanya variabel lain yaitu penduduk usia prima dan penduduk usia kerja

2.6 Hubungan antar Variabel

2.6.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi tidak lancar maka jumlah orang yang menjadi pengangguran semakin besar. Sebaliknya jika perekonomian suatu negara dalam keadaan

makmur maka makin kecil jumlah orang yang menganggur (Hatta, 2017).

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian menjadi lebih luas sehingga dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sebaliknya, tanpa adanya pembangunan ekonomi maka kegiatan perekonomian akan menjadi sempit. Hal ini akan mengakibatkan pada makin kecilnya kesempatan kerja sehingga mempertinggi tingkat pengangguran di masyarakat.

Jadi dengan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa kegiatan perekonomian akan menjadi luas yang artinya menuntut lebih banyak lagi keterlibatan angkatan kerja untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut sehingga menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja ikut meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini dimaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat dalam pasar tenaga kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan (Hatta, 2017)

2.6.2 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah melakukan penyesuaian untuk menyeimbangi penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara besarnya upah dan jumlah tenaga kerja tercapai saat upah minimum meningkat maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan penawaran tenaga kerja oleh para pencari kerja. Sebaliknya apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja lebih besar dibandingkan penawaran tenaga kerja (Purnami, 2015).

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan diikuti dengan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Terjadinya kenaikan harga mengakibatkan para konsumen akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan.

Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana jika semakin tinggi upah yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja maka semakin banyak jumlah penduduk yang usia kerja yang memilih masuk ke pasar tenaga kerja, maka dengan otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan menurunkan jumlah bukan anggota kerja. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maka akan meningkatkan tingkat partisipasi

angkatan kerja yang di akibatkan oleh kenaikan upah yang ditawarkan maka akan menurunnya angka pengangguran (Hatta, 2017).

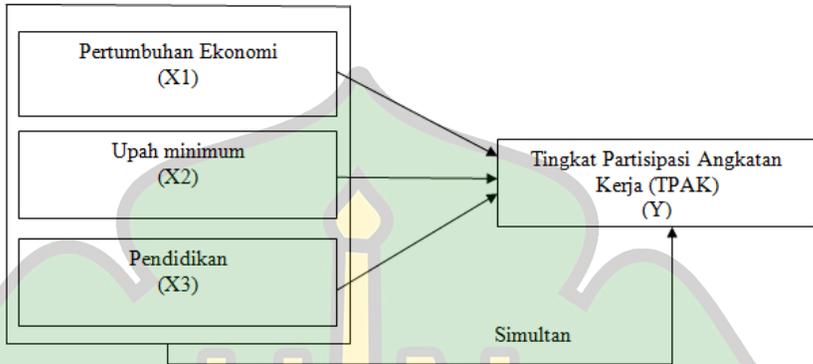
2.6.3 Hubungan Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hubungan tingkat pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja adalah semakin tinggi jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan tenaga kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan-pekerjaan yang *notabene* kemampuan (skil) dan ketrampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan terhadap para pekerja tertentu. (Rukmana, 2019).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari semua dasar-dasar teori yang ada dalam penelitian ini yang digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

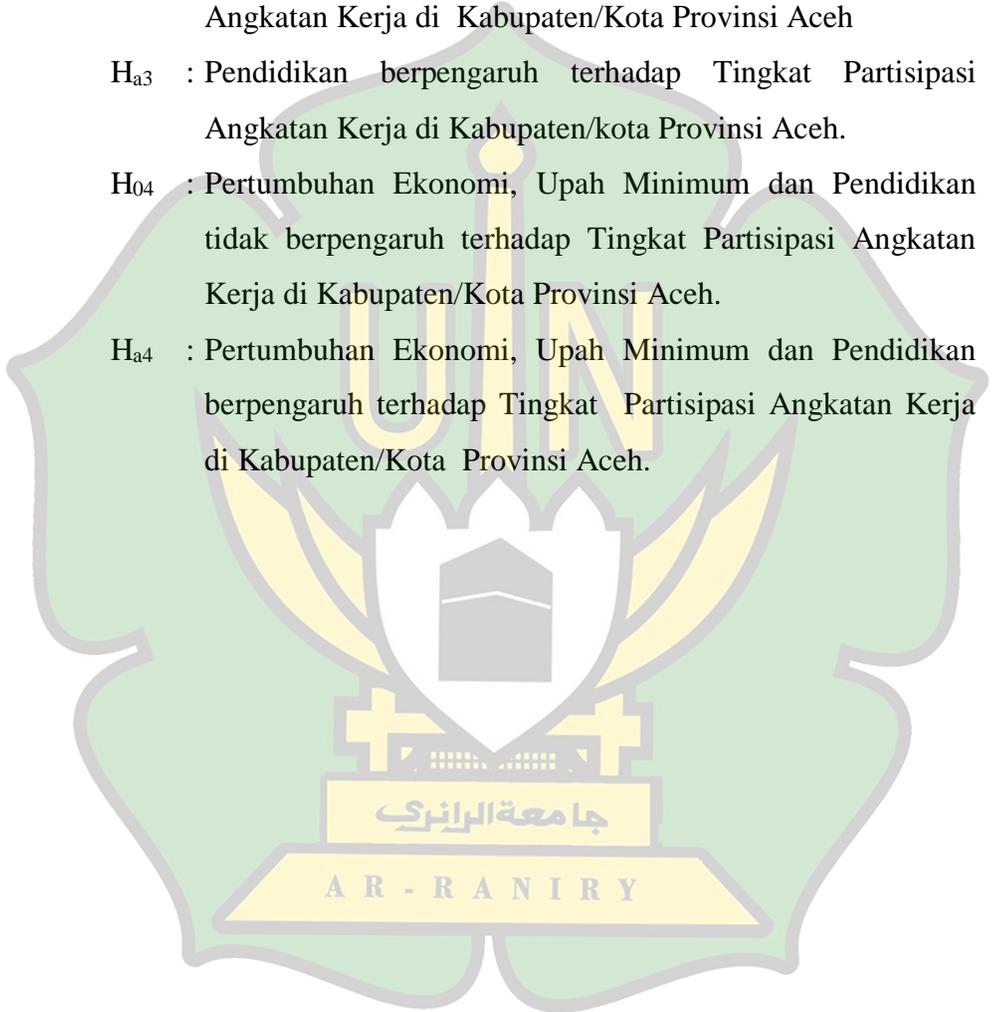


2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu keterangan sementara dari fakta yang diamati. Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H_{01} : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
- H_{a1} : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
- H_{02} : Upah minimum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

- H_{a2} : Upah minimum Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angka Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
- H₀₃ : Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
- H_{a3} : Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/kota Provinsi Aceh.
- H₀₄ : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
- H_{a4} : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menunjukkan dan membuktikan teori-teori untuk menerangkan suatu kejadian benar adanya atau fakta serta mengembangkan dan menguraikan statistika guna menunjukkan hubungan antar variabel. Narbuko (2013) dilihat dari pengertian tersebut peneliti ingin mengetahui apakah faktor pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Aceh dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi upah minimum, pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja di 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2020. Selain itu data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun

2012-2020 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2008). Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan dan publikasi pertumbuhan ekonomi/data PDRB, upah minimum, pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh .

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang menjadi sumber data sebenarnya (Sugiono, 2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh untuk periode 2012-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel dimana anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data berdasarkan atas pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu.

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian adalah suatu definisi, sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) Berikut adalah penjelasan kedua variabel tersebut variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minimum (X2) dan Pendidikan (X3). Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas tersebut di atas, dalam penelitian ini variabel dependen yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh (Y).

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (Y)	TPAK adalah persentase banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas (BPS)	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja	Rasio (%)
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah (Sukirno,2011)	PDRB atas harga konstan Kabupaten/kota Provinsi Aceh	Rasio (Rp)

Tabel 3.1 - Lanjutan

Upah Minimum (X2)	Upah merupakan imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor (BPS)	Upah Minimum Provinsi	Rasio (Rp)
Pendidikan (X3)	Pendidikan adalah suatu pembelajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran (Rukmana, 2019)	Total Angkatan Kerja berdasarkan pendidikan	Rasio (Orang)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda berupa data panel yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Data *time series* ini meliputi satu objek sedangkan data *cross section* terdiri atas beberapa atau banyak objek (Winarno,2007).

Model dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan :

Y : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

α : Konstanta

β : Koefisien regresi variabel independen

it : Variabel individu ke-i dan periode ke-1

X₁ : Pertumbuhan Ekonomi

X₂ : Upah minimum

X₃ : Pendidikan

e : Error term

3.5.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan dalam model estimasi regresi data panel yaitu metode *Common Effect*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Berikut penjelasan mengenai ketiga pendekatan estimasi:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Regresi data panel yang sederhana adalah *Common Effect Model* karena mengombinasikan data time series dengan data cross section. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku objek sama dengan kurun waktu. Adapun persamaan regresi dalam model *Common Effect* sebagai berikut:

$$TPAK_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 PD_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

α : Konstanta

β : Koefisien regresi variabel independen

it : Variabel individu ke-i dan periode ke-1

PE : Pertumbuhan Ekonomi

UM : Upah minimum

PD : Pendidikan

e : *Error term*

2. *Fixes Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interserepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixes Effect* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar objek. Oleh karena itu, dalam model *Fixes Effect* setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy yang dapat ditulis dalam persamaan berikut:

$$TPAK_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 PD_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

α : Konstanta

β : Koefisien regresi variabel independen

it : Variabel individu ke-i dan periode ke-1

PE : Pertumbuhan Ekonomi

UM : Upah minimum

PD : Pendidikan

e : *Error term*

3. *Random Effect Model (REM)*

Menganalisis regresi data panel dapat juga dilakukan menggunakan efek random. Dapat dikatakan bahwa *Model Random*

Effect merupakan alternative solusi jika *Model Fixed Effect* tidak tepat. Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap obyek mempunyai intersep. Namun diasumsikan bahwa intersep adalah variabel random. Keuntungan menggunakan model ini adalah menghilangkan heterokedaritas, Model ini disebut juga *error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. *Random Effect Model* dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$TPAK_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 UM_{it} + \beta_3 PD_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi variabel independen
- it : Variabel individu ke-i dan periode ke-1
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- UM : Upah minimum
- PD : Pendidikan
- e : *Error term*

3.5.3 Uji Goodness Of Fit

Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis regresi data panel, digunakan uji *Goodness Of Fit* yaitu dengan melakukan *uji chow*, *uji Hausman* dan *uji Lagrenge Multilier*. (Hidayat dan Nalle, 2017)

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas chi-cuquare $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Sebaliknya, apabila probabilitas chi-squere $< 0,05$ maka model yang sebaiknya dipakai yaitu model *fixed effect model* atau bisa disebut dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixes Effect Model* (FEM)

Jika uji Chow memilih *fixed effect model* maka langkah selanjutnya melakukan *random effect model* dan setelah itu barulah melakukan uji *hauman test* untuk memilih *fixed effect model* atau *random effect model*

2. Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model estimasi yang sebaiknya dipakai yaitu *fixes effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Jika Jika probabilitas dari *cross- section random* $< 0,05$ maka model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Dan sebaliknya jika probabilitas dari *cross- section random* $> 0,05$ maka model yang digunakan adalah *random effect model*. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixes Effect Model* (FEM)

Jika uji Hausman memilih *fixed effect model* maka yang harus dilakukan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Namun jika uji hauman memilih *Random Effect model* maka uji yang harus dilakukan yaitu uji *Lagrange Multiplier*. (Rukmana,2019)

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah model *random effect model* yang paling tepat digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika $LM >$ dari nilai *chi-square* maka akan menerima H_0 artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah *common effect model* bukan metode *random effect model*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect model* (OLS)

H_1 : *Random effect Model* (REM)

3.6 Pengujian Statistik

3.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut :

a) jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

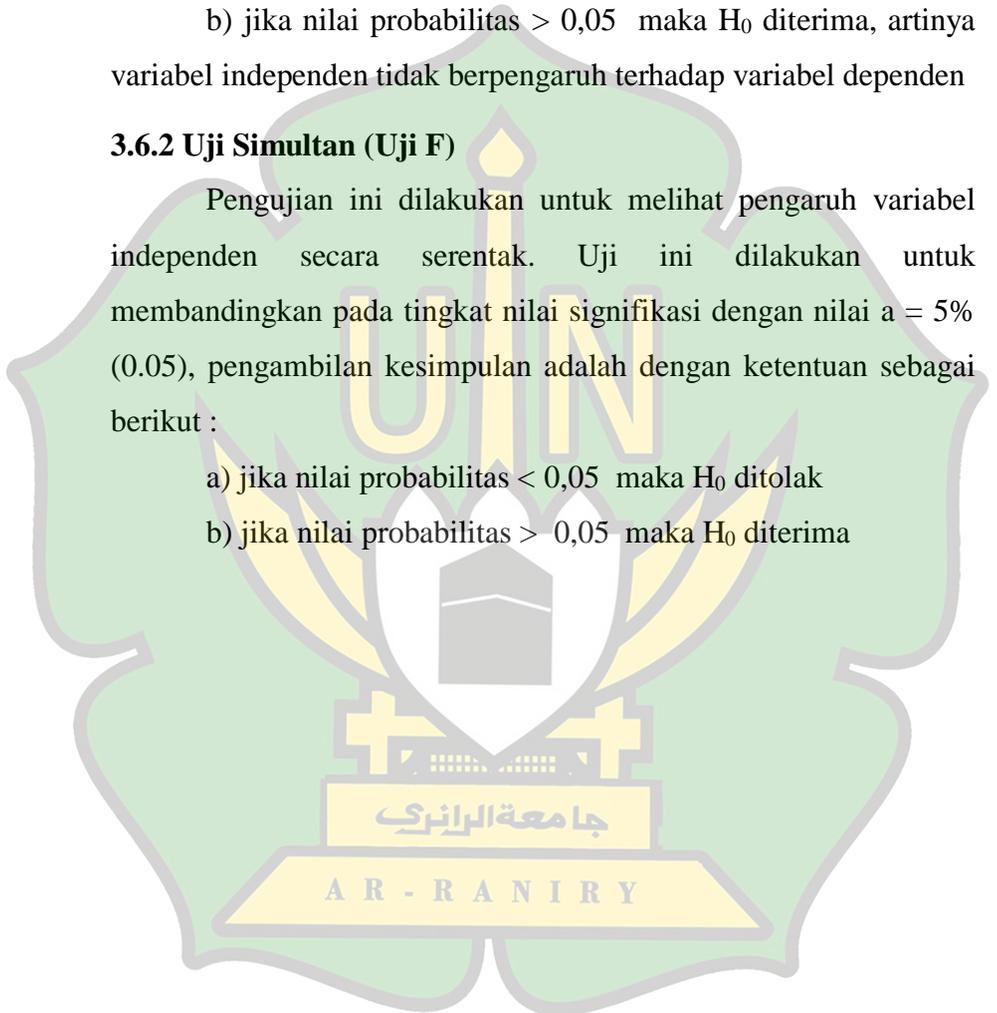
b) jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ (0.05), pengambilan kesimpulan adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

a) jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b) jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2o00'00"- 6o04'30" Lintang Utara dan 94o58'34"-98o15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, yang memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km², Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.

Provinsi Aceh memiliki posisi straregis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dang batas wilayah nya: sebelah Utara berbatasan dengan Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan provinsi Sumatera Utara.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan suatu data. Menurut (Sholikhah 2016), statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, atau keadaan sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan hanya bisa memberikan gambaran dari suatu sampel. Berikut adalah tabel statistik deskriptif:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	TPAK	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum	Pendidikan
Mean	6473.880	1289.043	1458.000	11.29348
Median	6312.500	1294.000	1459.500	11.00000
Maximum	8949.000	1459.000	1497.000	13.00000
Minimum	5141.000	1130.000	1415.000	9.000000
Std. Dev.	663.9549	78.70453	29.05751	0.732360

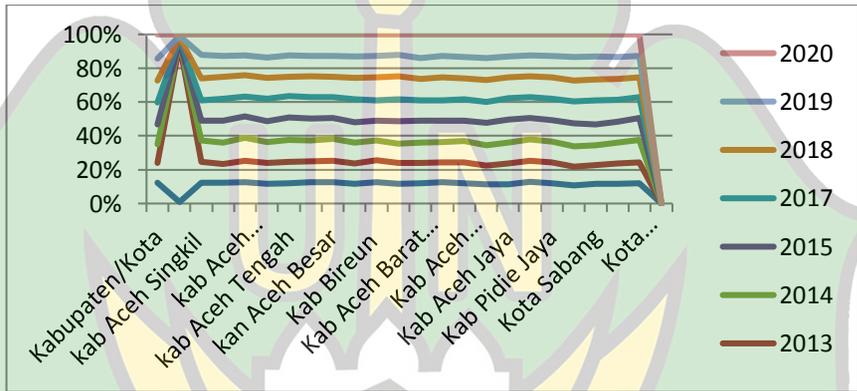
Sumber : Data diolah (2021)

4.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai minimum tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebesar 5141.000 dan nilai maksimum sebesar 8949.000 dengan nilai mean tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 6473.880. Standar deviasi pada tingkat partisipasi angkatan kerja dalam penelitian ini sebesar 663.9549. Standar deviasi yang lebih kecil

dari pada mean menandakan bahwa terjadinya kesenjangan yang rendah pada tingkat partisipasi angkatan kerja pada tiap Kabupaten/Kota di Provisi Aceh. berikut merupakan data tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/kota Provinsi Aceh:

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/kota Aceh
Tahun 2012-2020



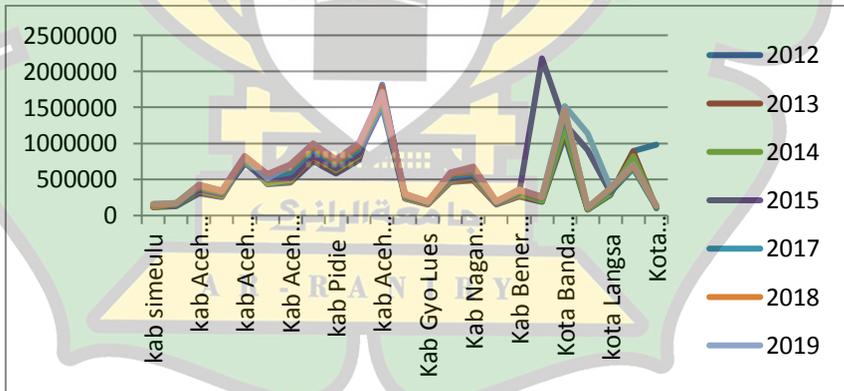
Sumber : Badan Pusat Statistik Data Diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Salah satunya di Kabupaten Bener Meriah. tingkat partisipasa angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 72,02 persen, ditahun 2015 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar 85,83 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 77,16 persen dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 82,52 persen.

4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Pengukuran pertumbuhan ekonomi didasarkan pada PDRB menurut harga konstan. Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar 1130.000 rupiah. Sementara nilai maksimum dari pertumbuhan ekonomi sebesar 1459.000 rupiah dan nilai mean sebesar 1289.043 rupiah. Standar deviasi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 78.70453. Standar deviasi yang lebih kecil dari pada mean menandakan bahwa terjadinya kesenjangan yang rendah pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berikut data pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh:

Gambar 4.2
PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Kabupaten/kota
di Provinsi Aceh tahun 2012-2020



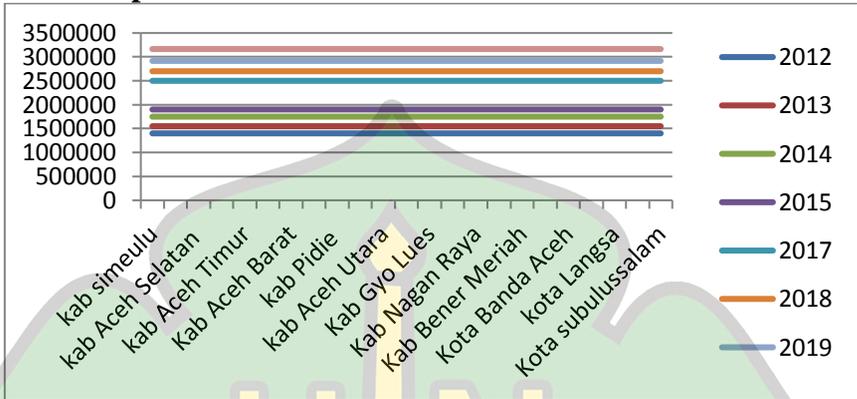
Sumber : Badan Pusat Statistik Data Diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota provinsi Aceh mengalami fluktuatif. Salah satunya dapat dilihat di kabupaten Aceh Utara. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yaitu sebesar 18.157,17 milyar rupiah. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yaitu sebesar 15.544,94 milyar rupiah. pada tahun tahun selajutnya selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 17.017.45 milyar rupiah.

4.2.3 Upah Minimum

Upah minimum merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Pengukuran upah minimum provinsi di dasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh nilai minimum upah minimum sebesar 1415.000 rupiah. sementara nilai maksimum dari upah minimum adalah sebesar 1497.000 rupiah dan nilai mean sebesar 1458.000 rupiah. standar deviasi pada upah minimum sebesar 29.05751. Standar deviasi yang lebih kecil dari pada mean menandakan bahwa terjadinya kesenjangan yang rendah pada tingkat upah minimum pada tiap Kabupaten/Kota di Provisi Aceh Berikut data upah minimum di Provinsi Aceh:

Gambar 4.2
Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2012-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Data Diolah (2021)

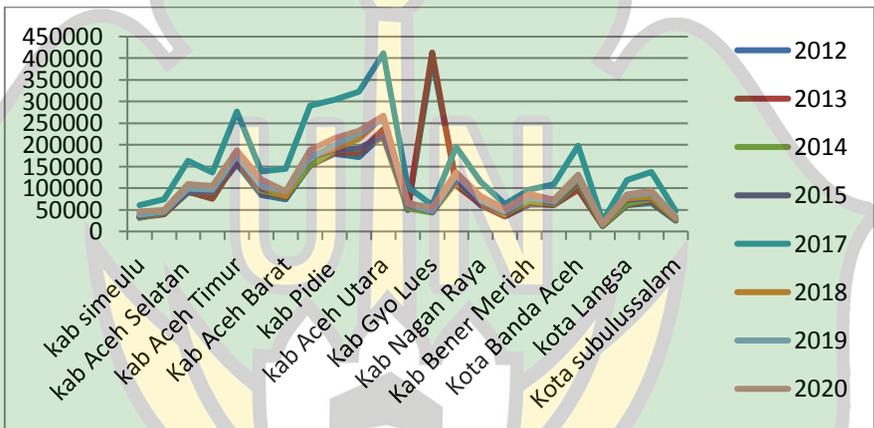
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa upah minimum provinsi Aceh selalu mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum provinsi Aceh cenderung seimbang setiap tahunnya. Upah minimum Provinsi Aceh yang ditetapkan berlaku untuk semua kabupaten/kota di provinsi Aceh. Kenaikan upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan kenaikan upah minimum bertujuan untuk menyamakan kebutuhan hidup masyarakat.

4.2.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Pengukuran pendidikan didasarkan pada pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum 9.000000 dari pendidikan adalah sementara nilai maksimumnya adalah 13.000000 dengan nilai mean sebesar 11.29348 dan standar deviasi adalah sebesar 0.732360. Standar deviasi yang lebih kecil dari pada mean menandakan bahwa terjadinya kesenjangan yang

rendah pada tingkat pendidikan pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berikut data tingkat pendidikan di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh:

Gambar 4.3
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Data Diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pendidikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Salah satunya dapat dilihat di kabupaten Aceh Timur, pendidikan pada tahun 2012 sebesar 15.5272 jiwa ditahun 2017 jumlah pendidikan kabupaten Aceh Timur meningkat sebesar 27.6605 jiwa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 17.2050 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 18.6206. Kenaikan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang ditamatkan salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan

jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masuk dalam katagori angkatan kerja.

4.3. Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yaitu pendekatan kuadrat terkecil *Common Effect Model (CEM)*, pendekatan efek tetap *Fixed Effect Model (FEM)* dan pendekatan efek acak *Random Effect Model (REM)*. Di mana untuk memilih metode terbaik dalam data panel dilakukan uji *Goodness of Fit* dengan menggunakan *Chow test*, *Hauman Test* dan *Lagrange Multiplier*. (Rukmana, 2019)

4.3.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih antara *model fixed effect* atau *model common effect* yang sebaiknya digunakan. Apabila hasil uji ini menunjukkan nilai probabilitas chi-square $> 0,05$ maka model yang dipilih *common effetc*, dan sebaliknya apabila probabilitas chi-square $< 0,05$ maka *model fixed effect* yang digunakan. (Rukmana, 2019). Hasil dari uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.772438	(22,158)	0.0000
Cross-section Chi-square	236.400075	22	0.0000

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji chow pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 yang

menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Uji hausman cara menentukan pemilihan model yang tepat dengan melihat nilai dari probabilitasnya apabila nilai probabilitas lebih > 0.05 maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* dan sebaliknya jika nilai probabilitasnya lebih < 0.05 maka model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Dari hasil pengolahan E-View 9 hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.290016	3	0.1518

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji hausman pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,1518 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F > 0,05$ ($0,1518 > 0,05$) yang menunjukkan bahwa H_0 diterima H_1 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier digunakan untuk memilih antara *random effect model* atau *common effect model* yang sebaiknya digunakan. Apabila hasil uji ini menunjukkan nilai p-value Breusch Pagan $> 0,05$ maka model yang dipilih *common effetc model*, dan sebaliknya apabila p-value Breusch Pagan $< 0,05$ maka *random effect model* yang digunakan. Berikut Hasil hasil uji lagrange multiplier :

Tabel 4.4
Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	279.5957 (0.0000)	1.328857 (0.2490)	280.9245 (0.0000)

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji lagrange multiplier pengolahan data panel diperoleh nilai p-value Breusch Pagan adalah 0.0000 yang menunjukkan bahwa nilai p-value Breusch Pagan $< 0,05$ (0,0000 $< 0,05$) yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *random effect model* (REM).

4.4 Hasil Uji Goodness of Fit

Dari hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Random Effect Model*. Hasil pengolahan data menggunakan *Random Effect Model* pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Prob.
C	-276.8983	0.8577
PE	-1.688531	0.0667
UM	4.099050	0.0000
PD	261.2972	0.0005
R-squared		0.204674
Adjusted R-squared		0.191418
F-statistic		15.44073
Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : data diolah (2021)

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = -276.8983 + (-1.688531)PE + 4.099050UM + 261.2972PD$$

Keterangan:

Y = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

PE = Pertumbuhan Ekonomi

UM = Upah Minimum

PD = Pendidikan

Dari persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -276.8983 menjelaskan bahwa jika nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka variabel dependen sama dengan -276.8983 .
2. Koefisien pertumbuhan ekonomi (PE) adalah sebesar -1.688531 yang menunjukkan bahwa apabila variabel pertumbuhan ekonomi meningkat satu satuan maka tidak akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Koefisien upah minimum (UM) adalah sebesar 4.099050 yang menunjukkan bahwa apabila variabel upah minimum meningkat satu satuan maka akan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 4.099050 .
4. Koefisien pendidikan (PD) adalah sebesar 261.2972 yang menunjukkan bahwa apabila variabel pendidikan meningkat satu satuan maka akan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 261.2972 .

4.5 Uji Hipotesis

Adapun uji hipotesis adalah sebagai berikut:

4.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Berikut merupakan hasil uji parsial:

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-statistik	t-tabel
PE	-1.845007	1.973
UM	4.271577	1.973
PD	3.520403	1.973

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan dari hasil uji parsial diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai t hitung sebesar $-1.845007 < t$ tabel 1.973 dan nilai signifikan sebesar $0.0667 > 0.005$ artinya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Variabel Upah Minimum memiliki nilai t hitung sebesar $4.271577 > t$ tabel 1.973 yang dan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0,05$ artinya bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Variabel Pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar $3.520403 > t$ tabel 1.973 dan nilai signifikan sebesar $0.0005 < 0.05$ artinya bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh seluruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk menentukan pengaruh signifikan secara simultan dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas pada F-statistik dengan tingkat signifikan 0,05.

Berikut merupakan hasil uji F:

Tabel 4.7
Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	15.44073
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel 4.7 nilai F-statistik dalam *model random effect* memiliki nilai sebesar 15.44073 dengan nilai Prob(F-statistik) sebesar 0.000000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yaitu 0,05. Artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

A R - R A N I R Y

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Dari hasil pengolahan data pada *model random effect* diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0667 yang artinya lebih besar dari $\alpha =$

0,05 atau 5% dengan nilai koefisien sebesar -1.688531. ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka tidak selalu menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan kecocokan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanura (2019) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil penelitian ini juga memiliki kecocokan dengan penelitian Khairunnisa, Rindayanti dan Wiwiek, (2020) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja berhubungan negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiasajaya (2018) juga menunjukkan kecocokan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang negatif. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan angka pembentukan pertumbuhan tidak hanya dihasilnya dari penduduk yang bekerja saja, melainkan melalui faktor lain, misalnya keadaan pertumbuhan ekonomi dunia, keadaan politik dan kondisi tanah dan kekayaan alam.

4.6.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari hasil pengolahan data pada *model random effect* diketahui bahwa variabel upah minimum (UM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien 4.099050. Ini menandakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya apabila upah minimum mengalami kenaikan Rp 1 maka akan meningkat pula tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 4.099050. Dengan asumsi variabel-variabel lainnya tetap. Teori menyatakan bahwa jika upah minimum dalam masyarakat meningkat maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tertarik masuk ke pasar kerja. Begitupun sebaliknya, ketika upah mengalami penurunan maka tingkat partisipasi angkatan kerja ikut menurun, disebabkan karena adanya harga waktu yang lebih mahal, selain itu kenaikan upah yang tinggi membuat potensi masyarakat untuk berkerja ikut tinggi.

Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan kecocokan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat, 2014) Penelitian yang dilakukan olehnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan tahun 2004-2012.

4.6.3 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Diketahui bahwa variabel pendidikan (PD) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0005 kurang dari $\alpha = 0,05$ atau (5%) dengan nilai koefisien sebesar 261.2972. ini menandakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendidikan terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. Maka artinya apabila pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 jiwa maka akan meningkatkan pula tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 261.2972. Hubungan yang positif pada pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pada hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh (Bonerri, 2018) yang berjudul pengaruh pendidikan dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Manado. Selain itu ada pula penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yang telah diteliti oleh (Rukmana, 2019) dengan judul penelitian Analisis determinasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di beberapa Provinsi di Indonesia.

4.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan secara Simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model regresi linear berganda dimana menggunakan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) diperoleh hasil nilai signifikan ($0,0000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi layak untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Pendidikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (UM) dan pendidikan (PD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Ardella, 2018) yang menyatakan bahwa variabel Upah, PDRB, dan pendidikan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai Faktor–Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi Aceh dalam penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 23 Kabupaten/kota provinsi Aceh. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat satu satuan maka tidak meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/kota Provinsi Aceh.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh dan signifikan terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja di 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh. Artinya setiap kenaikan upah minimum sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pula tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota di provinsi Aceh.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota provinsi Aceh. Apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan satu satuan

maka akan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten/kota provinsi Aceh.

4. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/kota Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh. Beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Dalam penyingkapi partisipasi angkatan kerja, pemerintah hendaknya memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif. Ini dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam memperoleh pendapatan masyarakat bawah.
2. Pemerintah hendaknya dalam mengambil dan menetapkan kebijakan ekonomi harus harus mempersiapkan inovasi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam segala sektor ekonomi dan sektor unggulan yang dimiliki pada setiap daerah.
3. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum hendaknya lebih memperhatikan standar upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi para tenaga kerja.

4. Kepada lembaga pendidikan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan skill dan kemampuan pada bidang yang dikuasainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adil. (2017), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pengolahan Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2015*. Makassar: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Adisasmita, R. (2013), *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrida, Br. (2007), *Ekonomi Sumber Daya Manusia* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Akbar, M. I (2011), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Kota Makasar Periode 2000-2009*. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Ardella, R. (2018), *Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Pulau Jawa Tahun 2006-2017*, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.
- Anuari, D. (2018), *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Arsyad. L. (2010), *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE edisi Pertama, 2010 h.54
- Badan Pusat Statistik (2012), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2012*

- Badan Pusat Statistik (2013), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2013*
- Badan Pusat Statistik (2014). *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2014*
- Badan Pusat Statistik (2015), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2015*
- Badan Pusat Statistik (2017), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2017*
- Badan Pusat Statistik (2018), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2018*
- Badan Pusat Statistik (2019), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2019*
- Badan Pusat Statistik (2019), *Provinsi Aceh Dalam Angka 2019*
- Badan Pusat Statistik (2020), *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2020*
- Badan Pusat Statistik (2020), *Provinsi Aceh Dalam Angka 2020*
- Basuki, P. (2014), *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bonerri, K. B. (2018), Pengaruh Pendidikan dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 01, 2018.
- Ferdinandus, S. (2014), Pengaruh Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Ambon. *Benchmark*, Vol. 2 No. 3. Juli, 2014

- Hatta, S. H. (2017), *Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Hidayat, M. (2014), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2012*, Makassar: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Uin Alauddin.
- Hidayat, A. H. dan Nalle, F. W. (2017), Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 01. 2017.
- Indah, P. L. (2019), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2017*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Indradewa, G. A. dan Natha, K. S. (2015), *Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4, N0 8. Agustus 2015.
- Khairunnisa, Rindayati, A. S. Dan Wiwiek (2020), Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Lestari, I. P. (2019), *Analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2017*, Sumatera Barat: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas.

Listyaningsih, W. D. (2017), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah*, Surakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah.

Mankiw, N. G. (2013), *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Narbuko, C dan Achmadi A. (2013) *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 tahun 2015, tentang pengupahan, BAB IV, pasal 43-45.

Purnami, I. (2014), *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di provinsi Jawa Barat Tahun 2010- 2013*, Jakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Resmiati, N. H. (2018), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah Indonesia*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Rukmana, T. A. (2019), *Analisis Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2008-2017*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rusalia, D. (2018), *Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2015-2017)* Lampung : Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Sanura, N. (2019), Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Barat, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 9 No. 1, 2019.
- Sari, A. K. (2013), Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang).
- Simbolon, R. (2010), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pekerja Wanita di di Kota Medan*. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Subandi. (2016), *Ekonomi Pembangunan: cetakan keempat*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008), *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015), *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati, R. (2012), Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksos*, Vol.8 No. 3, 2012.
- Sulistiyono. (2019), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat N I Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam Tahun 2013-2015*, Lampung: Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sukirno, S. (2015), *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada).

Sholihah, U. (2018), *Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Karessidenan Pati Tahun 2007-2016*, Program Studi Ekonomi islam Institut Agama Islam Negari Kudus.

Sholikhah, A. (2016), *Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kuantitatif*, *Komonika*. Vol. 10, No. 2 2016.

Syahputra, A. (2020), *Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan. PDRB dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara*, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan

Tarigan, R. (2014), *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tiasajaya, R. P. (2018), *Determinasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur*, Jember: Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.

Winarno, W.W. (2007), *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Zahari, M. (2017), *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Of Economics And Busines*, Vol. 1 No. 1. September, 2017

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Analisis Regresi Panel

kabupaten/kota	Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Upah Minimum	Pendidikan
Kab. Simeulu	2012	60,55	118014	1400000	33320
Kab. Simeulu	2013	57,19	125354	1550000	32068
Kab. Simeulu	2014	53,41	129809	1750000	30655
Kab. Simeulu	2015	57,81	134465	1900000	33807
Kab. Simeulu	2017	63,51	146798	2500000	60315
Kab. Simeulu	2018	64,65	153185	2700000	39510
Kab. Simeulu	2019	62,68	160463	2916810	38870
Kab. Simeulu	2020	70,37	160291	3165030	46354
Kab. Aceh Singkil	2012	62,16	131593	1400000	41048
Kab. Aceh Singkil	2013	69,08	137498	1550000	39921
Kab. Aceh Singkil	2014	65,17	142608	1750000	45208
Kab. Aceh Singkil	2015	63,83	147914	1900000	45273
Kab. Aceh Singkil	2017	59,43	160098	2500000	74466
Kab. Aceh Singkil	2018	63,11	166492	2700000	48504
Kab. Aceh Singkil	2019	69,25	173460	2916810	45904
Kab. Aceh Singkil	2020	61,97	171108	3165030	50089
Kab. Aceh Selatan	2012	61,72	311559	1400000	90675
Kab. Aceh Selatan	2013	51,41	328136	1550000	92015
Kab. Aceh Selatan	2014	63,66	342942	1750000	98112
Kab. Aceh Selatan	2015	58,63	357459	1900000	92151
Kab. Aceh Selatan	2017	59,70	388722	2500000	162999
Kab. Aceh Selatan	2018	65,66	406895	2700000	108555
Kab. Aceh Selatan	2019	59,25	423755	2916810	99581
Kab. Aceh Selatan	2020	61,41	424141	3165030	108829
Kab. Aceh Tenggara	2012	68,35	257809	1400000	82461
Kab. Aceh Tenggara	2013	61,11	270418	1550000	75211
Kab. Aceh Tenggara	2014	71,37	280799	1750000	90549
Kab. Aceh Tenggara	2015	71,03	292113	1900000	92175
Kab. Aceh Tenggara	2017	72,82	317595	2500000	136061
Kab. Aceh Tenggara	2018	73,07	330544	2700000	101501
Kab. Aceh Tenggara	2019	67,62	344239	2916810	95946
Kab. Aceh Tenggara	2020	71,33	343634	3165030	105331
Kab. Aceh Timur	2012	62,96	766793	1400000	155272
Kab. Aceh Timur	2013	65,13	776122	1550000	163282
Kab. Aceh Timur	2014	67,87	772142	1750000	175182

Kab. Aceh Timur	2015	63,14	725993	1900000	166666
Kab. Aceh Timur	2017	69,55	748753	2500000	276605
Kab. Aceh Timur	2018	63,96	781264	2700000	186266
Kab. Aceh Timur	2019	69,52	815710	2916810	172050
Kab. Aceh Timur	2020	61,92	829259	3165030	186206
KaB. Aceh Tengah	2012	68,69	434773	1400000	84477
KaB. Aceh Tengah	2013	72,72	458420	1550000	91607
KaB. Aceh Tengah	2014	72,23	447008	1750000	93547
KaB. Aceh Tengah	2015	74,58	497205	1900000	98908
KaB. Aceh Tengah	2017	76,80	541044	2500000	139011
Kab. Aceh Tengah	2018	72,69	563436	2700000	104048
Kab. Aceh Tengah	2019	72,77	518115	2916810	105755
KaB. Aceh Tengah	2020	79,96	576645	3165030	120264
Kab. Aceh Barat	2012	57,61	459454	1400000	74115
Kab. Aceh Barat	2013	60,68	477366	1550000	78889
Kab. Aceh Barat	2014	61,42	493384	1750000	83349
Kab. Aceh Barat	2015	63,67	516004	1900000	88306
Kab. Aceh Barat	2017	60,34	601322	2500000	145164
Kab. Aceh Barat	2018	54,58	660991	2700000	81282
Kab. Aceh Barat	2019	61,18	697833	2916810	92764
Kab. Aceh Barat	2020	59,41	708315	3165030	92879
Kab. Aceh Besar	2012	59,70	754954	1400000	153499
Kab. Aceh Besar	2013	57,87	786346	1550000	152389
Kab. Aceh Besar	2014	59,09	818445	1750000	159789
Kab. Aceh Besar	2015	61,90	831524	1900000	171358
Kab. Aceh Besar	2017	59,17	919740	2500000	290155
Kab. Aceh Besar	2018	58,77	959068	2700000	174219
Kab. Aceh Besar	2019	56,55	1000404	2916810	171290
Kab. Aceh Besar	2020	60,02	1000881	3165030	187623
Kab. Pidie	2012	65,04	580122	1400000	179412
Kab. Pidie	2013	65,46	604695	1550000	183512
Kab. Pidie	2014	65,60	629067	1750000	187924
Kab. Pidie	2015	64,34	659409	1900000	188548
Kab. Pidie	2017	63,05	715296	2500000	304631
Kab. Pidie	2018	62,04	745646	2700000	192190
Kab. Pidie	2019	63,37	778599	2916810	199580
Kab. Pidie	2020	65,55	776964	3165030	215316
Kab. Bireuen	2012	60,38	768970	1400000	172364
Kab. Bireuen	2013	62,18	799950	1550000	181580
Kab. Bireuen	2014	63,95	817131	1750000	191091
Kab. Bireuen	2015	62,38	848189	1900000	191893
Kab. Bireuen	2017	70,61	919793	2500000	322175
Kab. Bireuen	2018	64,96	959608	2700000	213661

Kab. Bireuen	2019	67,10	1006717	2916810	226030
Kab. Bireuen	2020	67,06	997058	3165030	233033
Kab. Aceh Utara	2012	60,20	1815176	1400000	225482
Kab. Aceh Utara	2013	62,09	1783661	1550000	236109
Kab. Aceh Utara	2014	55,88	1719554	1750000	217174
Kab. Aceh Utara	2015	55,65	1518477	1900000	220640
Kab. Aceh Utara	2017	57,21	1554494	2500000	411472
Kab. Aceh Utara	2018	63,56	1634373	2700000	265708
Kab. Aceh Utara	2019	61,39	1692286	2916810	260721
Kab. Aceh Utara	2020	60,31	1701545	3165030	267235
Kab. Aceh Barat Daya	2012	65,25	234714	1400000	50014
Kab. Aceh Barat Daya	2013	58,14	240189	1550000	54851
Kab. Aceh Barat Daya	2014	53,30	242832	1750000	53620
Kab. Aceh Barat Daya	2015	62,26	250931	1900000	61642
Kab. Aceh Barat Daya	2017	62,01	274078	2500000	103177
Kab. Aceh Barat Daya	2018	63,72	286717	2700000	66930
Kab. Aceh Barat Daya	2019	58,28	300311	2916810	62341
Kab. Aceh Barat Daya	2020	57,58	298756	3165030	64181
Kab. Gayo lues	2012	73,30	153165	1400000	39754
Kab. Gayo lues	2013	74,78	159075	1550000	41321
Kab. Gayo lues	2014	73,30	165236	1750000	43662
Kab. Gayo lues	2015	79,09	171727	1900000	45685
Kab. Gayo lues	2017	74,57	187223	2500000	60180
Kab. Gayo lues	2018	78,28	191313	2700000	48005
Kab. Gayo lues	2019	75,23	193246	2916810	46526
Kab. Gayo lues	2020	86,36	193687	3165030	55541
Kab. Aceh Tamiang	2012	65,28	465120	1400000	114777
Kab. Aceh Tamiang	2013	58,93	488561	1550000	105841
Kab. Aceh Tamiang	2014	62,16	500281	1750000	113924
Kab. Aceh Tamiang	2015	62,44	513452	1900000	119116
Kab. Aceh Tamiang	2017	62,82	549101	2500000	194857
Kab. Aceh Tamiang	2018	68,83	572724	2700000	136356
Kab. Aceh Tamiang	2019	65,27	598450	2916810	131353
Kab. Aceh Tamiang	2020	64,84	600937	3165030	136525
Kab. Nagan Raya	2012	59,41	486730	1400000	61157
Kab. Nagan Raya	2013	60,26	491336	1550000	62816
Kab. Nagan Raya	2014	63,74	520455	1750000	68505
Kab. Nagan Raya	2015	69,51	542207	1900000	65150
Kab. Nagan Raya	2017	62,75	586458	2500000	114864
Kab. Nagan Raya	2018	60,83	611992	2700000	71362
Kab. Nagan Raya	2019	61,63	648671	2916810	73900
Kab. Nagan Raya	2020	66,61	676195	3165030	81989
Kab. Aceh Jaya	2012	61,50	154126	1400000	34772

Kab. Aceh Jaya	2013	60,58	159057	1550000	34938
Kab. Aceh Jaya	2014	65,47	164932	1750000	39492
Kab. Aceh Jaya	2015	71,04	171058	1900000	43212
Kab. Aceh Jaya	2017	66,92	184815	2500000	63503
Kab. Aceh Jaya	2018	70,73	199274	2700000	45770
Kab. Aceh Jaya	2019	71,26	199421	2916810	47185
Kab. Aceh Jaya	2020	75,32	198245	3165030	52209
Kab. Bener Meriah	2012	72,02	266112	1400000	61813
Kab. Bener Meriah	2013	76,46	280461	1550000	67055
Kab. Bener Meriah	2014	78,75	292938	1750000	70958
Kab. Bener Meriah	2015	85,83	307058	1900000	79489
Kab. Bener Meriah	2017	89,49	333761	2500000	96908
Kab. Bener Meriah	2018	78,66	347701	2700000	77822
Kab. Bener Meriah	2019	77,16	362715	2916810	78573
Kab. Bener Meriah	2020	82,52	363617	3165030	87230
Kab. Pidie Jaya	2012	63,44	191849	1400000	61473
Kab. Pidie Jaya	2013	60,81	200577	1550000	60147
Kab. Pidie Jaya	2014	62,66	207851	1750000	63592
Kab. Pidie Jaya	2015	63,64	2179721	1900000	66150
Kab. Pidie Jaya	2017	62,12	239084	2500000	108993
Kab. Pidie Jaya	2018	61,37	250251	2700000	68344
Kab. Pidie Jaya	2019	60,46	260459	2916810	69216
Kab. Pidie Jaya	2020	62,13	257473	3165030	73331
Kota Banda Aceh	2012	57,06	1107968	1400000	97973
Kota Banda Aceh	2013	59,79	1159722	1550000	96811
Kota Banda Aceh	2014	59,58	1211852	1750000	112067
Kota Banda Aceh	2015	61,05	1272494	1900000	115696
Kota Banda Aceh	2017	60,45	1393710	2500000	197596
Kota Banda Aceh	2018	60,22	1456234	2700000	121477
Kota Banda Aceh	2019	61,39	1517099	2916810	126580
Kota Banda Aceh	2020	61,54	1466629	3165030	131147
Kota Sabang	2012	56,65	80687	1400000	12409
Kota Sabang	2013	58,56	84100	1550000	13020
Kota Sabang	2014	64,88	87511	1750000	14753
Kota Sabang	2015	71,42	91298	1900000	16505
Kota Sabang	2017	69,52	101538	2500000	23853
Kota Sabang	2018	65,82	107491	2700000	15963
Kota Sabang	2019	72,66	113743	2916810	17895
Kota Sabang	2020	71,55	112443	3165030	18063
Kota Langsa	2012	58,85	285112	1400000	61220
Kota Langsa	2013	56,52	298152	1550000	61781
Kota Langsa	2014	57,94	310782	1750000	64983
Kota Langsa	2015	63,43	322467	1900000	72674

Kota Langsa	2017	78,84	354072	2500000	119143
Kota Langsa	2018	62,66	370120	2700000	76230
Kota Langsa	2019	67,44	386551	2916810	83241
Kota Langsa	2020	66,58	381519	3165030	86007
Kota Lhokseumawe	2012	55,34	898037	1400000	65985
Kota Lhokseumawe	2013	57,77	887822	1550000	70733
Kota Lhokseumawe	2014	58,10	822232	1750000	75914
Kota Lhokseumawe	2015	58,38	655501	1900000	78047
Kota Lhokseumawe	2017	62,60	659166	2500000	137477
Kota Lhokseumawe	2018	57,61	684470	2700000	80996
Kota Lhokseumawe	2019	62,16	711619	2916810	89311
Kota Lhokseumawe	2020	63,17	700971	3165030	93958
Kota Subulussalam	2012	57,77	984713	1400000	25019
Kota Subulussalam	2013	63,77	98471	1550000	27087
Kota Subulussalam	2014	66,71	108784	1750000	29262
Kota Subulussalam	2015	65,90	113437	1900000	29580
Kota Subulussalam	2017	61,85	124612	2500000	47220
Kota Subulussalam	2018	58,76	130118	2700000	28741
Kota Subulussalam	2019	64,25	135869	2916810	31708
Kota Subulussalam	2020	64,18	138541	3165030	33165



Lampiran 2 : Data logaritma Analisis regresi Panel

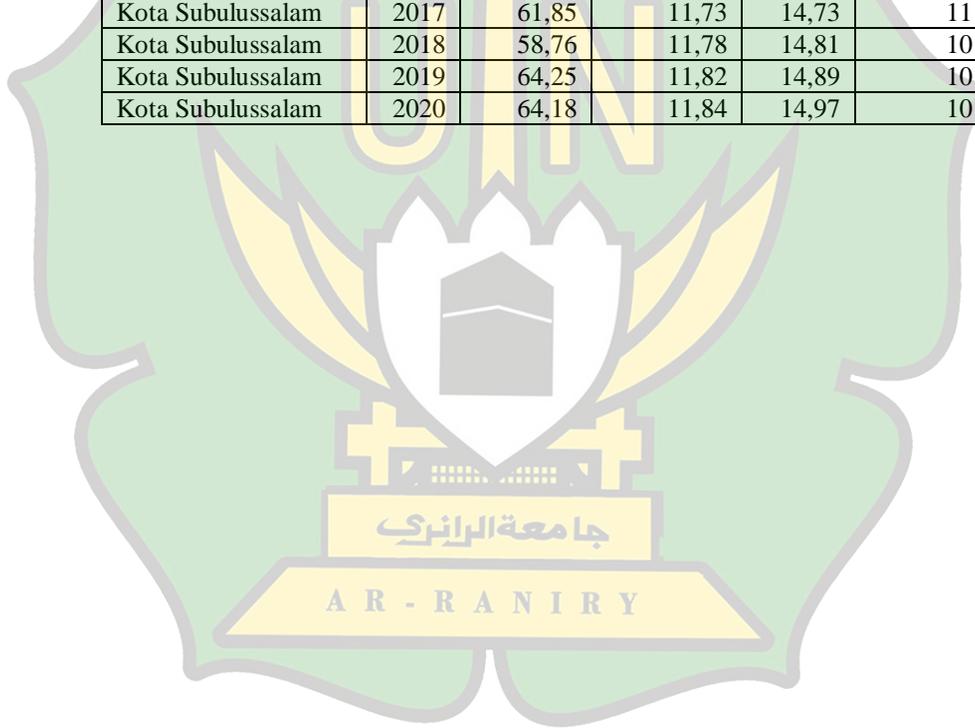
kabupaten/kota	Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Upah Minimum	Pendidikan
Kab. Simeulu	2012	60,55	11,68	14,15	10
Kab. Simeulu	2013	57,19	11,74	14,25	10
Kab. Simeulu	2014	53,41	11,77	14,38	10
Kab. Simeulu	2015	57,81	11,81	14,46	10
Kab. Simeulu	2017	63,51	11,90	14,73	11
Kab. Simeulu	2018	64,65	11,94	14,81	11
Kab. Simeulu	2019	62,68	11,99	14,89	11
Kab. Simeulu	2020	70,37	11,98	14,97	11
Kab. Aceh Singkil	2012	62,16	11,79	14,15	11
Kab. Aceh Singkil	2013	69,08	11,83	14,25	11
Kab. Aceh Singkil	2014	65,17	11,87	14,38	11
Kab. Aceh Singkil	2015	63,83	11,90	14,46	11
Kab. Aceh Singkil	2017	59,43	11,98	14,73	11
Kab. Aceh Singkil	2018	63,11	12,02	14,81	11
Kab. Aceh Singkil	2019	69,25	12,06	14,89	11
Kab. Aceh Singkil	2020	61,97	12,05	14,97	11
Kab. Aceh Selatan	2012	61,72	12,65	14,15	11
Kab. Aceh Selatan	2013	51,41	12,70	14,25	11
Kab. Aceh Selatan	2014	63,66	12,75	14,38	11
Kab. Aceh Selatan	2015	58,63	12,79	14,46	11
Kab. Aceh Selatan	2017	59,70	12,87	14,73	12
Kab. Aceh Selatan	2018	65,66	12,92	14,81	12
Kab. Aceh Selatan	2019	59,25	12,96	14,89	12
Kab. Aceh Selatan	2020	61,41	12,96	14,97	12
Kab. Aceh Tenggara	2012	68,35	12,46	14,15	11
Kab. Aceh Tenggara	2013	61,11	12,51	14,25	11
Kab. Aceh Tenggara	2014	71,37	12,55	14,38	11
Kab. Aceh Tenggara	2015	71,03	12,58	14,46	11
Kab. Aceh Tenggara	2017	72,82	12,67	14,73	12
Kab. Aceh Tenggara	2018	73,07	12,71	14,81	12
Kab. Aceh Tenggara	2019	67,62	12,75	14,89	11
Kab. Aceh Tenggara	2020	71,33	12,75	14,97	12
Kab. Aceh Timur	2012	62,96	13,55	14,15	12
Kab. Aceh Timur	2013	65,13	13,56	14,25	12
Kab. Aceh Timur	2014	67,87	13,56	14,38	12
Kab. Aceh Timur	2015	63,14	13,50	14,46	12
Kab. Aceh Timur	2017	69,55	13,53	14,73	13

Kab. Aceh Timur	2018	63,96	13,57	14,81	12
Kab. Aceh Timur	2019	69,52	13,61	14,89	12
Kab. Aceh Timur	2020	61,92	13,63	14,97	12
KaB. Aceh Tengah	2012	68,69	12,98	14,15	11
KaB. Aceh Tengah	2013	72,72	13,04	14,25	11
KaB. Aceh Tengah	2014	72,23	13,01	14,38	11
KaB. Aceh Tengah	2015	74,58	13,12	14,46	12
KaB. Aceh Tengah	2017	76,80	13,20	14,73	12
Kab. Aceh Tengah	2018	72,69	13,24	14,81	12
Kab. Aceh Tengah	2019	72,77	13,16	14,89	12
KaB. Aceh Tengah	2020	79,96	13,26	14,97	12
Kab. Aceh Barat	2012	57,61	13,04	14,15	11
Kab. Aceh Barat	2013	60,68	13,08	14,25	11
Kab. Aceh Barat	2014	61,42	13,11	14,38	11
Kab. Aceh Barat	2015	63,67	13,15	14,46	11
Kab. Aceh Barat	2017	60,34	13,31	14,73	12
Kab. Aceh Barat	2018	54,58	13,40	14,81	11
Kab. Aceh Barat	2019	61,18	13,46	14,89	11
Kab. Aceh Barat	2020	59,41	13,47	14,97	11
Kab. Aceh Besar	2012	59,70	13,53	14,15	12
Kab. Aceh Besar	2013	57,87	13,58	14,25	12
Kab. Aceh Besar	2014	59,09	13,62	14,38	12
Kab. Aceh Besar	2015	61,90	13,63	14,46	12
Kab. Aceh Besar	2017	59,17	13,73	14,73	13
Kab. Aceh Besar	2018	58,77	13,77	14,81	12
Kab. Aceh Besar	2019	56,55	13,82	14,89	12
Kab. Aceh Besar	2020	60,02	13,82	14,97	12
Kab. Pidie	2012	65,04	13,27	14,15	12
Kab. Pidie	2013	65,46	13,31	14,25	12
Kab. Pidie	2014	65,60	13,35	14,38	12
Kab. Pidie	2015	64,34	13,40	14,46	12
Kab. Pidie	2017	63,05	13,48	14,73	13
Kab. Pidie	2018	62,04	13,52	14,81	12
Kab. Pidie	2019	63,37	13,57	14,89	12
Kab. Pidie	2020	65,55	13,56	14,97	12
Kab. Bireuen	2012	60,38	13,55	14,15	12
Kab. Bireuen	2013	62,18	13,59	14,25	12
Kab. Bireuen	2014	63,95	13,61	14,38	12
Kab. Bireuen	2015	62,38	13,65	14,46	12
Kab. Bireuen	2017	70,61	13,73	14,73	13
Kab. Bireuen	2018	64,96	13,77	14,81	12
Kab. Bireuen	2019	67,10	13,82	14,89	12
Kab. Bireuen	2020	67,06	13,81	14,97	12

Kab. Aceh Utara	2012	60,20	14,41	14,15	12
Kab. Aceh Utara	2013	62,09	14,39	14,25	12
Kab. Aceh Utara	2014	55,88	14,36	14,38	12
Kab. Aceh Utara	2015	55,65	14,23	14,46	12
Kab. Aceh Utara	2017	57,21	14,26	14,73	13
Kab. Aceh Utara	2018	63,56	14,31	14,81	12
Kab. Aceh Utara	2019	61,39	14,34	14,89	12
Kab. Aceh Utara	2020	60,31	14,35	14,97	12
Kab. Aceh Barat Daya	2012	65,25	12,37	14,15	11
Kab. Aceh Barat Daya	2013	58,14	12,39	14,25	11
Kab. Aceh Barat Daya	2014	53,30	12,40	14,38	11
Kab. Aceh Barat Daya	2015	62,26	12,43	14,46	11
Kab. Aceh Barat Daya	2017	62,01	12,52	14,73	12
Kab. Aceh Barat Daya	2018	63,72	12,57	14,81	11
Kab. Aceh Barat Daya	2019	58,28	12,61	14,89	11
Kab. Aceh Barat Daya	2020	57,58	12,61	14,97	11
Kab. Gayo lues	2012	73,30	11,94	14,15	11
Kab. Gayo lues	2013	74,78	11,98	14,25	11
Kab. Gayo lues	2014	73,30	12,02	14,38	11
Kab. Gayo lues	2015	79,09	12,05	14,46	11
Kab. Gayo lues	2017	74,57	12,14	14,73	11
Kab. Gayo lues	2018	78,28	12,16	14,81	11
Kab. Gayo lues	2019	75,23	12,17	14,89	11
Kab. Gayo lues	2020	86,36	12,17	14,97	11
Kab. Aceh Tamiang	2012	65,28	13,05	14,15	12
Kab. Aceh Tamiang	2013	58,93	13,10	14,25	12
Kab. Aceh Tamiang	2014	62,16	13,12	14,38	12
Kab. Aceh Tamiang	2015	62,44	13,15	14,46	12
Kab. Aceh Tamiang	2017	62,82	13,22	14,73	12
Kab. Aceh Tamiang	2018	68,83	13,26	14,81	12
Kab. Aceh Tamiang	2019	65,27	13,30	14,89	12
Kab. Aceh Tamiang	2020	64,84	13,31	14,97	12
Kab. Nagan Raya	2012	59,41	13,10	14,15	11
Kab. Nagan Raya	2013	60,26	13,10	14,25	11
Kab. Nagan Raya	2014	63,74	13,16	14,38	11
Kab. Nagan Raya	2015	69,51	13,20	14,46	11
Kab. Nagan Raya	2017	62,75	13,28	14,73	12
Kab. Nagan Raya	2018	60,83	13,32	14,81	11
Kab. Nagan Raya	2019	61,63	13,38	14,89	11
Kab. Nagan Raya	2020	66,61	13,42	14,97	11
Kab. Aceh Jaya	2012	61,50	11,95	14,15	10
Kab. Aceh Jaya	2013	60,58	11,98	14,25	10
Kab. Aceh Jaya	2014	65,47	12,01	14,38	11

Kab. Aceh Jaya	2015	71,04	12,05	14,46	11
Kab. Aceh Jaya	2017	66,92	12,13	14,73	11
Kab. Aceh Jaya	2018	70,73	12,20	14,81	11
Kab. Aceh Jaya	2019	71,26	12,20	14,89	11
Kab. Aceh Jaya	2020	75,32	12,20	14,97	11
Kab. Bener Meriah	2012	72,02	12,49	14,15	11
Kab. Bener Meriah	2013	76,46	12,54	14,25	11
Kab. Bener Meriah	2014	78,75	12,59	14,38	11
Kab. Bener Meriah	2015	85,83	12,63	14,46	11
Kab. Bener Meriah	2017	89,49	12,72	14,73	11
Kab. Bener Meriah	2018	78,66	12,76	14,81	11
Kab. Bener Meriah	2019	77,16	12,80	14,89	11
Kab. Bener Meriah	2020	82,52	12,80	14,97	11
Kab. Pidie Jaya	2012	63,44	12,16	14,15	11
Kab. Pidie Jaya	2013	60,81	12,21	14,25	11
Kab. Pidie Jaya	2014	62,66	12,24	14,38	11
Kab. Pidie Jaya	2015	63,64	14,59	14,46	11
Kab. Pidie Jaya	2017	62,12	12,38	14,73	12
Kab. Pidie Jaya	2018	61,37	12,43	14,81	11
Kab. Pidie Jaya	2019	60,46	12,47	14,89	11
Kab. Pidie Jaya	2020	62,13	12,46	14,97	11
Kota Banda Aceh	2012	57,06	13,92	14,15	11
Kota Banda Aceh	2013	59,79	13,96	14,25	11
Kota Banda Aceh	2014	59,58	14,01	14,38	12
Kota Banda Aceh	2015	61,05	14,06	14,46	12
Kota Banda Aceh	2017	60,45	14,15	14,73	12
Kota Banda Aceh	2018	60,22	14,19	14,81	12
Kota Banda Aceh	2019	61,39	14,23	14,89	12
Kota Banda Aceh	2020	61,54	14,20	14,97	12
Kota Sabang	2012	56,65	11,30	14,15	9
Kota Sabang	2013	58,56	11,34	14,25	9
Kota Sabang	2014	64,88	11,38	14,38	10
Kota Sabang	2015	71,42	11,42	14,46	10
Kota Sabang	2017	69,52	11,53	14,73	10
Kota Sabang	2018	65,82	11,59	14,81	10
Kota Sabang	2019	72,66	11,64	14,89	10
Kota Sabang	2020	71,55	11,63	14,97	10
Kota Langsa	2012	58,85	12,56	14,15	11
Kota Langsa	2013	56,52	12,61	14,25	11
Kota Langsa	2014	57,94	12,65	14,38	11
Kota Langsa	2015	63,43	12,68	14,46	11
Kota Langsa	2017	78,84	12,78	14,73	12
Kota Langsa	2018	62,66	12,82	14,81	11

Kota Langsa	2019	67,44	12,87	14,89	11
Kota Langsa	2020	66,58	12,85	14,97	11
Kota Lhokseumawe	2012	55,34	13,71	14,15	11
Kota Lhokseumawe	2013	57,77	13,70	14,25	11
Kota Lhokseumawe	2014	58,10	13,62	14,38	11
Kota Lhokseumawe	2015	58,38	13,39	14,46	11
Kota Lhokseumawe	2017	62,60	13,40	14,73	12
Kota Lhokseumawe	2018	57,61	13,44	14,81	11
Kota Lhokseumawe	2019	62,16	13,48	14,89	11
Kota Lhokseumawe	2020	63,17	13,46	14,97	11
Kota Subulussalam	2012	57,77	13,80	14,15	10
Kota Subulussalam	2013	63,77	11,50	14,25	10
Kota Subulussalam	2014	66,71	11,60	14,38	10
Kota Subulussalam	2015	65,90	11,64	14,46	10
Kota Subulussalam	2017	61,85	11,73	14,73	11
Kota Subulussalam	2018	58,76	11,78	14,81	10
Kota Subulussalam	2019	64,25	11,82	14,89	10
Kota Subulussalam	2020	64,18	11,84	14,97	10



Lampiran 3 Hasil Common Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/04/21 Time: 10:20
 Sample: 2013 2020
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.167	2348.558	0.847399	0.3979
X1	-4.143977	0.841936	-4.921963	0.0000
X2	4.554577	1.598023	2.850132	0.0049
X3	282.0129	92.10581	3.061837	0.0025
R-squared	0.164231	Mean dependent var		6473.880
Adjusted R-squared	0.150301	S.D. dependent var		663.9549
S.E. of regression	612.0278	Akaike info criterion		15.69293
Sum squared resid	67424043	Schwarz criterion		15.76282
Log likelihood	-1439.750	Hannan-Quinn criter.		15.72126
F-statistic	11.79014	Durbin-Watson stat		0.590488
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4 Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/04/21 Time: 10:21
 Sample: 2013 2020
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1826.554	1684.348	-1.084427	0.2798
X1	-0.248542	1.110588	-0.223793	0.8232
X2	3.530946	0.998163	3.537444	0.0005
X3	307.4957	79.59525	3.863242	0.0002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.768734	Mean dependent var	6473.880
Adjusted R-squared	0.732141	S.D. dependent var	663.9549
S.E. of regression	343.6305	Akaike info criterion	14.64728
Sum squared resid	18656949	Schwarz criterion	15.10156
Log likelihood	-1321.550	Hannan-Quinn criter.	14.83141
F-statistic	21.00781	Durbin-Watson stat	1.966499
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 5 Hasil Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/04/21 Time: 10:22
 Sample: 2013 2020
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 184
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-276.8983	1541.574	-0.179621	0.8577
X1	-1.688531	0.915190	-1.845007	0.0667
X2	4.099050	0.959610	4.271577	0.0000
X3	261.2972	74.22367	3.520403	0.0005
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			527.7982	0.7023
Idiosyncratic random			343.6305	0.2977
Weighted Statistics				
R-squared	0.204674	Mean dependent var		1452.220
Adjusted R-squared	0.191418	S.D. dependent var		385.6230
S.E. of regression	346.7567	Sum squared resid		21643243
F-statistic	15.44073	Durbin-Watson stat		1.710664
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.089066	Mean dependent var		6473.880
Sum squared resid	73487807	Durbin-Watson stat		0.503816

Lampiran 6

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.772438	(22,158)	0.0000
Cross-section Chi-square	236.400075	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/21 Time: 10:21
Sample: 2013 2020
Periods included: 8
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1990.167	2348.558	0.847399	0.3979
X1	-4.143977	0.841936	-4.921963	0.0000
X2	4.554577	1.598023	2.850132	0.0049
X3	282.0129	92.10581	3.061837	0.0025

R-squared	0.164231	Mean dependent var	6473.880
Adjusted R-squared	0.150301	S.D. dependent var	663.9549
S.E. of regression	612.0278	Akaike info criterion	15.69293
Sum squared resid	67424043	Schwarz criterion	15.76282
Log likelihood	-1439.750	Hannan-Quinn criter.	15.72126
F-statistic	11.79014	Durbin-Watson stat	0.590488
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.290016	3	0.1518

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.248542	-1.688531	0.395833	0.0221
X2	3.530946	4.099050	0.075477	0.0387
X3	307.495744	261.297233	826.250238	0.1080

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/21 Time: 10:23
Sample: 2013 2020
Periods included: 8
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1826.554	1684.348	-1.084427	0.2798
X1	-0.248542	1.110588	-0.223793	0.8232
X2	3.530946	0.998163	3.537444	0.0005
X3	307.4957	79.59525	3.863242	0.0002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.768734	Mean dependent var	6473.880
Adjusted R-squared	0.732141	S.D. dependent var	663.9549
S.E. of regression	343.6305	Akaike info criterion	14.64728
Sum squared resid	18656949	Schwarz criterion	15.10156

Log likelihood	-1321.550	Hannan-Quinn criter.	14.83141
F-statistic	21.00781	Durbin-Watson stat	1.966499
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	279.5957 (0.0000)	1.328857 (0.2490)	280.9245 (0.0000)
Honda	16.72111 (0.0000)	-1.152761 --	11.00849 (0.0000)
King-Wu	16.72111 (0.0000)	-1.152761 --	7.211104 (0.0000)
Standardized Honda	17.74399 (0.0000)	-0.731845 --	8.572193 (0.0000)
Standardized King-Wu	17.74399 (0.0000)	-0.731845 --	4.933073 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	279.5957 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952